

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan 7. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi 2. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi. Cetakan 12. Jakarta: Djambatan, 2008.
- HS, Salim. *Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Edisi 1. Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- _____. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Edisi 1. Cetakan 4. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 8. Cetakan 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- _____. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Edisi 5. Cetakan 4. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Perangin, Effendi. *Praktek Jual Beli Tanah*. Edisi 1. Cetakan 2. Jakarta: Rajawali, 1990.
- _____. *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*. Edisi 1. Cetakan 4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Putro, Widodo Dwi, Ahmad Zuhairi, Syukron Salam, dan Elizabeth Lestari Taruli Lubis. *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, Jakarta: LeIP, 2016.
- SA, Romli, Muhammad Sadi Is, Febrina Hertika Rani, Dea Justicia Ardha, Ifrohati, Arne Huzaimah, M. Tamudin, Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, Jemmi Angga Saputra, Andriyani, Suryati, Layang Sardana, Sri husnulwati, Sri Wahyuningsih, Ramanata Disurya, Ermini, Yanuar syam Putra, Deva Nabilah, Benny Sultan, Halwa Sabilah, Hana pertiwi, dan Dodi Irawan.

Perlindungan Hukum. Cetakan 1. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sidabariba, Burhan. *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan : Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*. Cetakan 1. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan 18. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan 22. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cetakan 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

_____. *Hukum Perjanjian*. Cetakan 19. Jakarta: Intermedia, 2002.

Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cetakan 7. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012.

Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Edisi 1. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Edisi 1. Cetakan 10. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1369).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Mlg, tentang gugatan perdata mengenai kepemilikan hak milik atas tanah, 30 Januari 2023.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 271/PDT/2023/PT SBY, tentang gugatan perdata mengenai kepemilikan hak milik atas tanah, 25 Mei 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/2024, tentang gugatan perdata mengenai kepemilikan hak milik atas tanah, 25 April 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 PK/Pdt/2024, tentang gugatan perdata mengenai kepemilikan hak milik atas tanah, 28 November 2024.

Jurnal

Ana Silviana, Khairul Anami, dan Handojo Djoko Waloejo, “Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah”, *Law, Development & Justice Review*, Vol 3 No. 2 (November 2020): 191-195, <https://www.neliti.com/publications/498812/memahami-pentingnya-akta-jual-beli-ajb-dalam-transaksi-pemindahan-hak-atas-tanah>

Junaedi dan Gunawan Djajaputra, “Tanggung Jawab PPAT Sementara Dan Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol 4 No 1 (Maret 2022): 107-136, <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p107-136>

Marcho Gideon Vicenco Ngongoloy, Dani Robert Pinasang, dan Nixon S.Lowing, “Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021”, *Lex Privatum*, Vol 10 No. 5 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42843>

Paula Swandayani Hartanto, “Akibat Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Buruk”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 5 No. 2 (Maret 2021): 639-645, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Tesis

Alfian, Rahmad, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 121/Pdt.G/2015/PN.Pdg)”, *Tesis*, Universitas Andalas, 2024.

Suwoto, Oktafiani Hatma, “Keabsahan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 40/Hm/IX/1982 Yang Dibuat Oleh PPAT Sementara Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang”, *Tesis*, Universitas Brawijaya, 2017.